

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen tentang Negara*, Konstitusi Press, 2012
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Andjar W. Pacta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Cita Yustisia Serfiyani, Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, 2017, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Cetakan ke-1. Penerbit Andi, Yogyakarta,
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- DR. H. Salim HS., SH.,M.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, Jakarta,2015
- Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktek*, Cetakan Ke-dua, Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta ,2004
- HS, Salim dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1.Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers,2013

Ibnoe Soedjono, Ibnoe 2007, *Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri*, Jakarta, LSP2I-ISC, 2007

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, Jakarta:ISEI,1990

Jimly, Asshiddiqie dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Kartasapoetro, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jogjakarta, 2007.

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana,2015

Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineke Cipta & Bina Adiaksara, 2007

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada

Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang- undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya*, Yuridika Vol. 25 No. 2, Mei–Agustus 2010: 103–116.

Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011

Subiyanto, Arif, , *Manajemen Koperasi* Gosyen Publishing, Jawa Tengah, 2015

Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988

B. Artikel

Abdullah. “*Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis*”. Makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006

Beneficial Ownership Register Opens On 6 April 2016 <https://www.bdo.co.uk/en-gb/insights/business-edge/business-edge-2016/beneficial-ownership-register>, diakses 1 Desember 2019

International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FATF Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism”, Washington DC; IMF Publication, 2014

John Hatchard, Money Laundering: “*Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)*”...

Kelsen,Hans,General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts

Muslim, Fithriadi, *Menjaga Integritas Korporasi Melalui Transparansi Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi*, 2018

Otong Rosadi, *Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanah Konstitusional*, <http://tebarkasih.blogspot.com/2009/08/artikel-memajukan-kesejahteraan-umum.html>, diakses 14 Desember 2019.

Transparency Internasional “*Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership*”2015

C. Perundang-undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. BN. No.715, 2019

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian. BN. No.833, 2018

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13 Tahun 2018. LN Tahun 2018 Nomor 23

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PP Nomor 24. LN Tahun 2018 Nomor 90.TLN Nomor 6215

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang tentang Perkoperasian. UU Nomor 25 Tahun 1992. LN Nomor 116 Tahun 1992, TLN.3502

_____ Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014.
LN. 244 Tahun 2014, TLN 5587

_____ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004.
LN. Tahun 2004 Nomor 117 TLN. Nomor 4432

